

# KEADILAN SOSIAL

Gagasan welfare state:

- Setiap warga-negara berhak atas kesejahteraan dasar dan taraf hidup minimum
- Negara harus diperlengkapi oleh orang yang bertanggungjawab atas kesejahteraan warganya
- Full employment merupakan tujuan sosial yang harus didukung kebijakan pemerintah

# PARTISIPASI WARGA SEBAGAI PENENTU KEBIJAKAN

1. Electoral participation; sudah berkembang dlm UU Pemilu dan berjalan baik di Indonesia. What's next?
2. Partisipasi kelompok; Masalah: kecenderungan bhw kelompok penekan lebih efektif ketimbang partai politik.
3. Citizen-government contacting; Efektif untuk memperbaiki kinerja layanan publik. Tapi di Indonesia belum berjalan baik.
4. Keterlibatan langsung dalam kegiatan birokrasi publik; Efektif tetapi peluangnya sangat sempit.

# ETIKA LINGKUNGAN

1. Perumus kebijakan masih terfokus pada non-renewable resources.
2. Kewajiban kepada lingkungan adalah mengenai keberlanjutan hidup manusia.
3. Ekonomi vs. etika lingkungan; Penggunaan polluters-pay principle
4. UU lingkungan adalah yang paling sulit ditegakkan di Indonesia.

# LAYANAN UMUM

1. Setiap pejabat publik memiliki “discretionary power”
2. “High cost economy” adalah akibat etika layanan umum yang rendah
3. Produk layanan pemerintah Indonesia cenderung target-oriented, belum result-oriented
4. Good-governance punya kaitan langsung dengan kualitas layanan umum.